

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pengelolaan keuangan, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya kejujuran dan akuntabilitas. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dengan suatu hutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.² Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan yang akurat dan transparan dalam setiap transaksi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Penerapan prinsip ini dalam pengelolaan keuangan daerah sangat relevan, terutama dalam konteks penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel menjadi sangat penting. SIPD muncul sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan. SIPD dirancang untuk memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keuangan yang akurat, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pemerintah daerah.³ Di Kabupaten Kediri, Dinas Perumahan dan Kawasan

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemahan* Edisi Baru, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002)

³ Muhammad Irfan Nasution Dan Nurwani, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan" *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* Vol.9 No.2 Agustus 2021

Permukiman memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur perumahan. Namun, meskipun telah diterapkan SIPD, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam hal akurasi dan ketepatan waktu laporan keuangan yang dihasilkan.

Meskipun banyak daerah telah menerapkan SIPD, efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan masih perlu dievaluasi. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan SIPD dalam konteks Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan.

SIPD diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019, SIPD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui integrasi data dan informasi yang lebih baik.⁴ Namun, dalam praktiknya, penerapan SIPD sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman pengguna, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta resistensi terhadap perubahan dari pegawai yang terbiasa dengan sistem manual.⁵ Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

⁴ Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah*

⁵ Nidya Vitriana, Agustawati Dkk, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Pekanbaru" *Digital Business Journal* Vol.1 No.1 Juli 2022

keberhasilan penerapan SIPD di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

Dalam kajian literatur, terdapat gap research yang menunjukkan bahwa meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai penerapan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, masih sedikit yang secara spesifik membahas dampak SIPD terhadap kualitas laporan keuangan di tingkat dinas, khususnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Teoretical gap ini menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana SIPD dapat dioptimalkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam konteks penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penemuan terbaru dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan SIPD di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali pengalaman dan pandangan dari para informan yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. Penemuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penerapan sistem informasi yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan SIPD dan bagaimana cara mengatasinya.

Adapun berikut beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang hampir serupa seperti yang dilakukan oleh Tumija, Asep Hendra, dan Marja

Sinurat⁶ pada tahun 2023. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa penerapan SIPD dapat menyediakan informasi yang konsisten dan dapat diandalkan untuk laporan keuangan yang mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Penerapan SIPD juga memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu terdapat pada teknik analisis yang berbeda dan fokus pembahasan yang berbeda, karena pada penelitian yang akan peneliti lakukan lebih kepada membahas mengenai analisis terhadap kualitas laporan keuangan, serta tempat penelitian yang akan dilakukan juga berbeda.

Selain itu, Kadek Prawira Wahyudi, Marja Sinurat, dkk⁷ tahun 2024. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa di Kabupaten Gianyar sudah menerapkan aplikasi SIPD untuk membantu meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan SIPD, proses pelaporan keuangan menjadi lebih terintegrasi, akurat, dan tepat waktu. Dengan diterapkannya SIPD juga memungkinkan data keuangan diakses dengan mudah oleh pihak-pihak terkait, yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan teknologi informasi, pelatihan yang memadai bagi pegawai, serta peningkatan infrastruktur teknologi sangat penting dalam memaksimalkan fungsi SIPD di Kabupaten Gianyar. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti

⁶ Tumija, Asep Hendra, Dan Marja Sinurat. “*Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*”, Jurnal Media Birokrasi, Vol.5, No.1, Tahun 2023, Hlm. 79-91

⁷Kadek Prawira Wahyudi, Dkk, “*Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Gianyar*”, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik, Vol. 11, No. 1, 2024, Hlm. 27-38

yaitu terdapat pada fokus yang akan dibahas, teknik analisis metodenya serta tempat penelitian yang akan dilakukan.

Hal ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Agustin Maulani, dkk⁸ pada tahun 2023. Hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa penerapan SIPD memiliki dampak positif pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan daerah. Namun dalam penerapannya, SIPD lebih banyak digunakan dalam perencanaan dan penganggaran dikarenakan proses tersebut memang pertama kali digunakan dan dapat dikatakan berjalan lancar tanpa adanya error atau keterbatasan menu. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu terdapat pada objek yang akan diteliti, teknik analisis penelitiannya serta tempat penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu diketahui bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dinilai positif dan efektif dalam membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan, pencatatan transaksi keuangan daerah, pengelolaan asset dan juga pelayanan masyarakat. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa perbedaan yang terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas, teori yang akan digunakan, dan juga tempat yang akan dijadikan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil studi kasus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka muncul suatu pertanyaan mengenai bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang telah diterapkan di Kabupaten Kediri, apakah dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Maka untuk menjawab pertanyaan

⁸ Agustin Maulani, Dkk. “*Inovasi Teknologi Dalam Pemerintahan: Implementasi Sipd Sebagai Alat Untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 7, No. 2, Tahun 2023. Hlm. 1415-1422

tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul: **“Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang akan menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan setelah diterapkannya Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana kualitas laporan keuangan setelah diterapkannya Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.
3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar serta mengarah pada hasil yang tidak jelas dari pembahasan dimaksudkan, maka peneliti hanya akan fokus membahas mengenai penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai peran kebijakan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta dapat mengidentifikasi beberapa kendala atau hambatan dalam penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri. Temuan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian di masa mendatang pada bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bentuk tambahan pengetahuan dan sumber informasi bagi lembaga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri dalam penerapan serta penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

- b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dokumen akademik yang diharapkan dapat menjadi referensi maupun acuan untuk pembelajaran mahasiswa dan juga dapat dijadikan referensi maupun acuan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- c. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri adalah mendapatkan pengalaman dalam meneliti penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

- a. Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintah Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Kemudian dipertegas lagi dalam Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu merupakan platform

yang digunakan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

SIPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan pembangunan serta memfasilitasi integrasi data dan informasi antara pemerintah pusat dan daerah. SIPD diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan koordinasi serta dapat membantu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel.⁹

b. Informasi Keuangan Daerah

Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.¹⁰

c. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat diartikan sebagai laporan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.¹¹

⁹ Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah*

¹⁰ Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah*

¹¹ Helmi Hermawati, "Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan", *Jurnal Akuntansi Unihaz*, Vol. 2 No. 1, 2019, Hlm. 17

d. Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan ukuran-ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah akan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.¹²

e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri

Merupakan lembaga pemerintah yang bertugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Secara Operasional

Berdasarkan penjelasan penegasan istilah di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dalam judul “Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri” adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam proses membantu meningkatkan kualitas laporan yang ada pada tempat tersebut. Diharapkan dengan adanya SIPD tersebut dapat membantu

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada dibandingkan sebelum digunakannya SIPD.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dimuat per-bab yang terdiri dari 6 bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-bab sebagai perincinya.

BAB I Pendahuluan

Pada pendahuluan, berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi mengenai kajian teori yang digunakan dalam penelitian dan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dalam penelitian

BAB III Metodologi Penelitian

Pada metode penelitian berisi tentang : metode yang digunakan didalam penelitian yaitu mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data dan (h) tahapan penelitian

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini merupakan hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan yaitu tentang paparan data dan temuan data dari ke enam fokus masalah yang diangkat.

BAB V Pembahasan

Bab ini memuat mengenai hubungan antara teori yang ditemukan terhadap teori-teori sebelumnya, serta penjelasan dari temuan teori yang terdapat di lapangan.

BAB VI Penutup

Pada penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA